



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

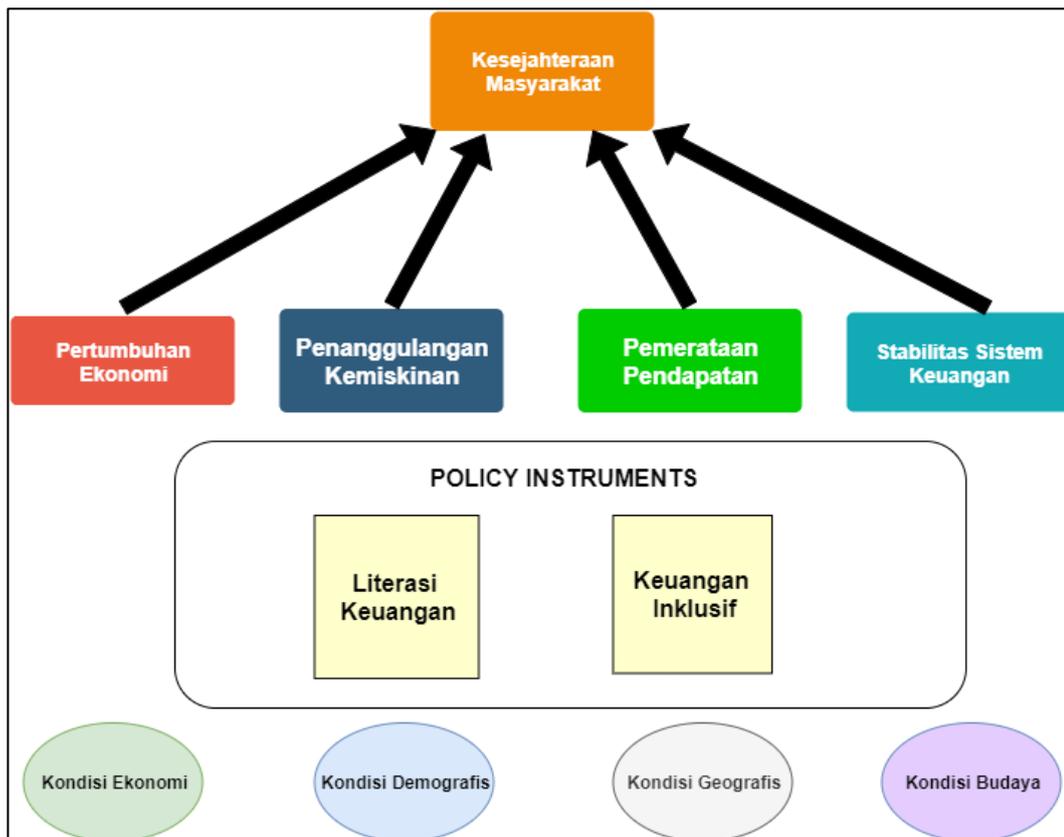
This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya pemerintah dalam membangun negara Indonesia maka diperlukan tren pertumbuhan ekonomi yang menguat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2019). Untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik diperlukan adanya upaya dari pemerintahan untuk meningkatkan hal tersebut.

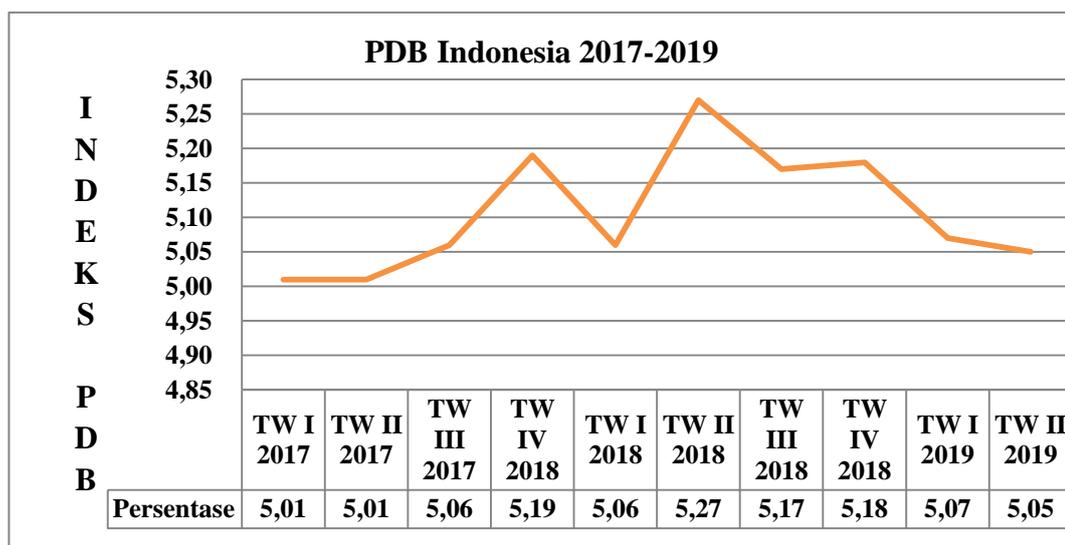


Sumber : Soetiono & Setiawan, 2018

Gambar 1.1 Pentingnya Literasi dan Inklusi Keuangan Dari Berbagai Aspek

Berdasarkan gambar 1.1 didapatkan komponen-komponen pendukung untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Komponen yang dimaksud berupa pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Dengan menggunakan instrument untuk kebijakan berupa literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dilihat dari berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, kondisi demografis, kondisi geografis dan kondisi budaya di Indonesia.

Dari sisi ekonomi di Indonesia, sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode, PDB (Produk Domestik Bruto) mengalami penurunan sampai dengan data yang sudah diperbaharui per triwulan II tahun 2019 (BPS, 2019). Terlihat dari grafik di bawah ini yang menggambarkan bagaimana perubahan yang terjadi pada PDB di Indonesia dari tahun 2017-2019.

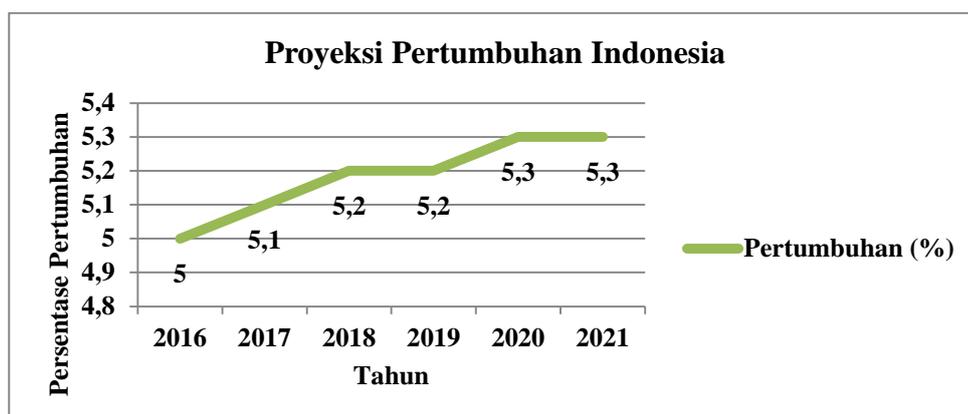


Sumber : BPS, 2019 (Data Diolah)

**Gambar 1.2 Grafik Produk Domestik Bruto Indonesia Per Triwulan
Periode 2017-2019**

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bagaimana pertumbuhan PDB Indonesia dari triwulan I tahun 2017 sampai triwulan II 2019. Terlihat terjadi tren penurunan PDB dua kali berturut-turut di triwulan I dan triwulan II tahun 2019 yaitu di angka 5,07% dan 5,05%. Jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018 berada pada angka yang cukup tinggi yaitu 5,18% sehingga terlihat jelas PDB Indonesia di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu ke angka 5,07% dan berlanjut ke 5,05%. Hal ini menandakan masih banyak faktor-faktor lain yang memicu rendahnya tingkat produktivitas di Indonesia sehingga menyebabkan penurunan PDB di tahun 2019.

Bank Dunia (*World Bank*) melakukan proyeksi terhadap perekonomian di Indonesia untuk dua tahun kedepan yaitu 2020 sampai 2021. Dimana pada proyeksi yang dilakukan oleh Bank Dunia didasarkan kepada tren dari ekonomi yang sedang terjadi di dunia dan bagaimana tren yang sedang terjadi akan mempengaruhi negara-negara berkembang terutama di pasar komoditas dan pasar keuangan di negara-negara berkembang (Worldbank, 2019).



Sumber : Worldbank, 2019 (Data Diolah)

Gambar 1.3 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Perkenomian di Indonesia menurut Bank Dunia dari Tahun 2016 sampai 2021

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bagaimana proyeksi dari Bank Dunia untuk pertumbuhan perkenomian di Indonesia yang akan mengalami kondisi stagnan dan/atau tidak bergerak di angka 5,3% pada tahun 2020 dan 2021. Proyeksi ini merupakan hasil dari tren perkenomian dunia dan bersifat independen sehingga setiap proyeksi yang ada hanya merupakan penggambaran dari keadaan yang sedang terjadi. Tentu saja hal ini juga merupakan hasil dari PDB di Indonesia yang mengalami penurunan secara dua kali berturut-turut di triwulan I dan II sesuai dengan tabel sebelumnya.

Dalam kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lima pembagian kepulauan besar yaitu pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Maluku dan Papua, dan terakhir adalah pulau Bali dan Nusa Tenggara. Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Setiap pulau-pulau besar di Indonesia memberikan kontribusi untuk PDB nasional sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah.

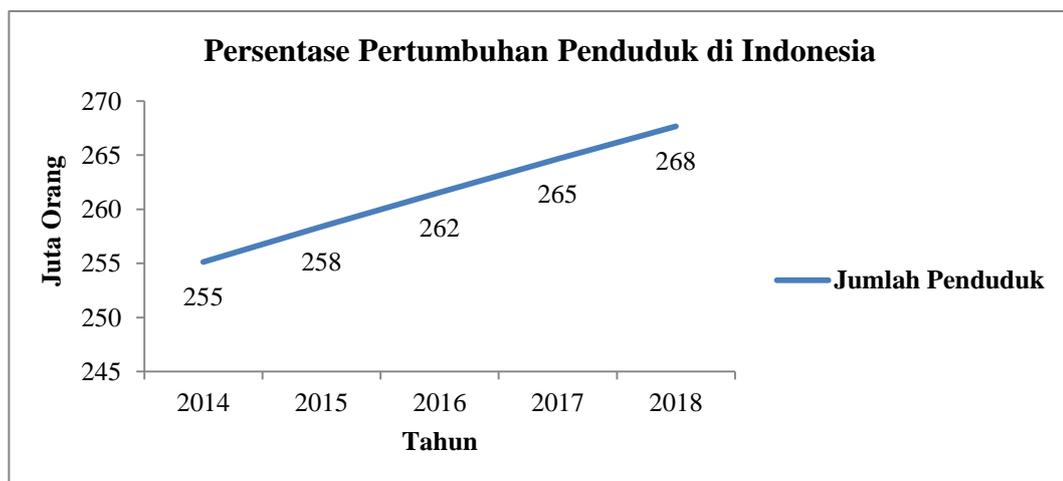


Sumber : BPS, 2019

Gambar 1.4 Pertumbuhan dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Pulau-Pulau Besar di Indonesia per Triwulan II 2019

Dari gambar di atas terlihat dimana pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih bertumpu di pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 59,11% dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,68% dan pertumbuhan PDB di pulau Jawa lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDB secara nasional. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemerataan pertumbuhan di Indonesia yang masih didominasi oleh pulau Jawa sebagai pulau dimana terdapat ibu kota Indonesia yaitu Jakarta.

Kondisi demografis di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara memiliki data jumlah penduduk seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Worldbank, 2019 (Data diolah)

**Gambar 1.5 Grafik Persentase Pertumbuhan Penduduk di Indonesia
Tahun 2014-2018**

Gambar 1.4 menggambarkan bagaimana pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tinggi dari tahun ke tahun dan mencapai angka 268 juta orang di akhir tahun 2018. Pertumbuhan penduduk jika tidak di tangani dengan baik

oleh pemerintah di Indonesia akan memberikan banyak dampak negatif di setiap sektor kehidupan masyarakat, sehingga penting sekali untuk dikendalikan dan disesuaikan dengan fasilitas pengembangan penduduk. Ditambah dengan proyeksi BPS yang menunjukkan penduduk pada usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun meningkat dari 67,28% di tahun 2015 menjadi 67,9% di tahun 2035. Hal ini akan membuat berkurangnya beban ketergantungan (*dependency ratio*) turun dari 48,63% pada tahun 2015 menjadi 47,28% pada tahun 2035. Bonus demografi ini akan membawa keuntungan bagi negara Indonesia dengan ditopang oleh kualitas SDM yang memadai.

Dengan terus bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia maka isu kependudukan jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kemiskinan dan ketimpangan di wilayah Indonesia. Dimana kemiskinan sangat erat berhubungan dengan ketimpangan sosial. Sehingga pemerintah menetapkan Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah ratio yang menggambarkan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna) (BPS, 2019). Dengan tingkatan penilaian untuk gini ratio sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Penilaian *Gini Ratio* di Indonesia

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Sumber : BPS, 2019

Pentingnya *gini ratio* membuat pemerintah pusat dan daerah selalu melakukan pembaharuan data untuk memastikan bahwa tingkat pemerataan sudah mencapai angka yang ideal. Sehingga dapat terlihat bagaimana perkembangan *gini ratio* di Indonesia sebagai salah satu alat ukur pemerintah untuk pemerataan yang ideal dari tabel 1.2.

Tabel 1.2 *Gini Ratio* Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia 2015-2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019
	Sem 1	Sem 2	Sem 1						
DKI Jakarta	0,431	0,421	0,411	0,397	0,413	0,409	0,394	0,390	0,394
Jawa Barat	0,415	0,426	0,413	0,402	0,403	0,393	0,407	0,405	0,402
Jawa Tengah	0,382	0,382	0,366	0,357	0,365	0,365	0,378	0,357	0,361
DI Yogyakarta	0,433	0,420	0,420	0,425	0,432	0,440	0,441	0,422	0,423
Jawa Timur	0,415	0,403	0,402	0,402	0,396	0,415	0,379	0,371	0,370
Banten	0,401	0,386	0,394	0,392	0,382	0,379	0,385	0,367	0,365
Indonesia	0,408	0,402	0,397	0,394	0,393	0,391	0,389	0,384	0,382

Sumber : BPS, 2019 (Data diolah)

Terlihat dari tabel 1.2 perkembangan angka *gini ratio* yang diambil untuk setiap provinsi di pulau Jawa sebagai penyumbang PDRB terbesar dan ditambah dengan *gini ratio* di Indonesia secara keseluruhan. Di pulau Jawa yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten berada pada tingkat nilai koefisien *gini ratio* kurang dari 0,4 sehingga dapat dikategorikan sesuai dengan tabel 1.1, keempat provinsi ini memiliki tingkat ketimpangan yang rendah.

Wilayah Jawa Barat dan DI Yogyakarta masih berada pada tingkat koefisien *gini ratio* di antara 0,4-0,5 dan sesuai dengan tabel 1.1 dapat dikategorikan memiliki tingkat ketimpangan yang sedang. Gini ratio Indonesia yang mewakili seluruh pulau dan daerah yang ada mencapai angka 0,382 lebih kecil dari 0,4 sehingga masuk ke dalam kategori memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Sehingga negara Indonesia secara keseluruhan sudah memiliki tingkat ketimpangan yang rendah dan perlu untuk terus ditingkatkan pada setiap provinsi di dalamnya.

Berkurangnya tingkat ketimpangan di Indonesia harus diikuti dengan kualitas penduduk di Indonesia yang semakin membaik. Kualitas penduduk di Indonesia ditandai dengan pendidikan yang diambil oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga pemerintah menetapkan indeks pembangunan manusia sebagai indeks dasar untuk mengetahui indikator pembangunan masyarakat di Indonesia. Indeks pembangunan manusia atau IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan di suatu negara dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS, 2019). Berdasarkan metode baru perhitungan IPM menurut BPS, untuk menilai pencapaian IPM antar wilayah IPM dikelompokkan kedalam beberapa kategori, yaitu:

Tabel 1.3 Pengelompokkan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia

No	Tingkat IPM	Keterangan
1	IPM < 60	IPM Rendah
2	60 < IPM < 70	IPM Sedang
3	70 < IPM < 80	IPM Tinggi
4	IPM > 80	IPM Sangat Tinggi

Sumber : BPS, 2019

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2015-2018

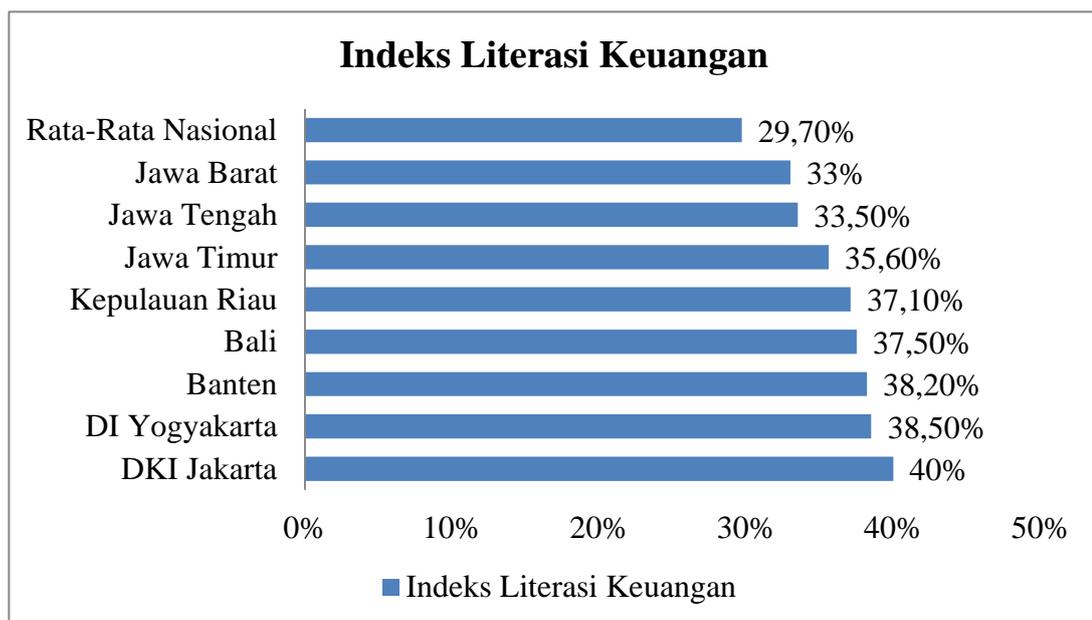
Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia			
	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	78,99	79,60	80,06	80,47
Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12
DI Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95

Sumber : BPS, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bagaimana indeks pembangunan manusia sebagai salah satu indikator pembangunan masyarakat di Indonesia selama lima tahun dari tahun 2015 sampai 2018 dan tabel 1.3 sebagai panduan penilaian IPM. Berdasarkan kategori IPM untuk menilai tingkat IPM antar wilayah di Indonesia dapat disimpulkan wilayah DKI Jakarta berada pada IPM yang tinggi dan terus naik sampai IPM yang sangat tinggi yaitu di angka 80 ke atas. Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten berada pada kategori IPM sedang dan terus naik sampai ke kategori IPM tinggi. Wilayah DI Yogyakarta terus berada di IPM yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pulau Jawa memiliki sudah berada di katogeri IPM yang tinggi dengan nilai terendah per tahun 2018 di angka 70,77 dan nilai tertinggi 80,47.

Menimbang perkembangan perekonomian yang semakin dinamis secara domestik dan global, pemerintah pusat dan daerah terus mendorong masyarakat

Indonesia yang semakin bertumbuh dan berkembang. Akses terhadap layanan produk dan jasa lembaga keuangan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga harus menjadi fokus pemerintah untuk terus mengurangi permasalahan ini. Menurut survei dari OJK di tahun 2016 indeks literasi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013 dari 21,8% menjadi 29,7% di tahun 2016. Angka ini berarti pada setiap 100 penduduk di Indonesia hanya sekitar 30 orang penduduk yang masuk ke dalam kategori *well literate* atau memiliki literasi keuangan yang baik. Berikut merupakan indeks literasi keuangan masyarakat di Indonesia per tahun 2016 :



Sumber : OJK, 2019 (Data Diolah)

Gambar 1.6 Indeks Literasi Keuangan di Indonesia per Tahun 2016 Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan gambaran indeks literasi keuangan di Indonesia pada gambar 1.6 terlihat bagaimana provinsi-provinsi dengan nilai terbesar di atas rata-rata berada di pulau Jawa. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di pulau Jawa sudah

terliterate dengan baik. Dengan perolehan untuk DKI Jakarta sebesar 40% sampai Jawa Barat 33%. Di sisi lain indeks literasi keuangan di Indonesia belum mencapai 50% dimana belum tercapai setengah dari penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik.

Sehingga keputusan para pelaku usaha untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan dan mengelola keuangan mereka dengan berbagai pihak terkait tentu saja menggambarkan bagaimana tingkat *financial inclusion* atau inklusi keuangan di definisikan sebagai keadaan di mana semua orang dewasa di usia kerja memiliki akses efektif ke kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Dengan pengertian dari akses yang efektif oleh CGAP-GPI (2019) pada definisi keuangan inklusif di dalam Bank Indonesia (2019), merupakan pemberian layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, dengan biaya terjangkau bagi pelanggan dan berkelanjutan bagi penyedia, dengan hasil bahwa pelanggan yang dikecualikan secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada layanan informal yang ada.

Data inklusi keuangan yang dikutip dari Bank Dunia di Asia Pasifik dan Asia Timur per 2018 berada di angka 70,6% orang dewasa (di atas umur 15 tahun) yang memiliki akun, menyimpan uang mereka di institusi keuangan selama satu tahun terakhir sebesar 30,6%, dan meminjam uang dari institusi keuangan atau menggunakan kartu kredit sebesar 21,5% (World Bank, 2018). Untuk di Indonesia data dari OJK menunjukkan tingkat inklusi keuangan di angka 67,8% di tahun 2016 dimana naik sebesar 8,1% dari survei terakhir di tahun 2013 yaitu

sebesar 59,7%. Hal ini berarti masyarakat Indonesia telah mengakses lembaga jasa keuangan formal.

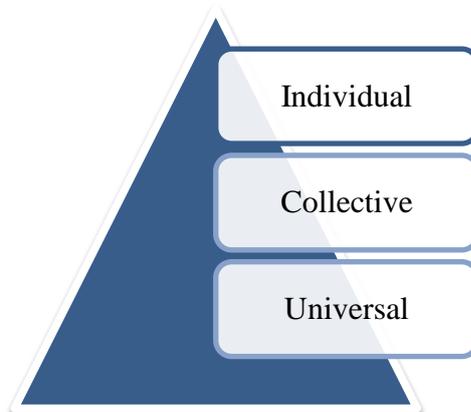
Menurut Bank Indonesia inklusi keuangan memiliki beberapa manfaat yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
6. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang *sustain* dan berkelanjutan.
8. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk mencapai tingkat inklusi keuangan yang baik seorang individu atau pelaku usaha harus melewati proses pengambilan keputusan untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Dalam proses pengambilan keputusan manusia memiliki cara nya masing-masing sesuai dengan keunikan yang ada di dalam diri mereka. Menurut teori yang dikembangkan oleh Hofstede terdapat tiga tingkatan dari budaya pengambilan keputusan manusia.

Berdasarkan kondisi budaya di Indonesia yang berada di antara dua Benua besar yaitu Asia dan Australia membuat negara Indonesia memiliki berbagai

macam suku dan budaya yang memiliki keunikannya masing-masing. Dengan adanya era globalisasi pengaruh modernisasi membawa perubahan sosial budaya di dalam masyarakat Indonesia dari tradisional menjadi lebih modern dan tercermin melalui pola pengelolaan keuangan masyarakat yang semakin maju serta memanfaatkan produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan formal (Soetiono & Setiawan, 2018). Namun belum seluruh masyarakat Indonesia menerima modernisasi tersebut. Beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan lembaga tradisional (non formal) untuk memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat tersebut karena berdasarkan prinsip kepercayaan dan penghormatan atas adat yang cukup kuat dan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman untuk melakukan kegiatan keuangan melalui lembaga tradisional dibandingkan dengan lembaga keuangan formal (OJK,2015).



Sumber : Hofstede, 2001 (Data Diolah)

Gambar 1.7 Tiga Level Keunikan Dari Pemrograman Mental Manusia

Di dalam buku *Culture Consequences* yang dibuat oleh Hofstede (2001) dijelaskan di dalam teori *culture dimensions* bagaimana program di dalam mental manusia dapat diwariskan atau ditransfer setelah seorang manusia lahir ke dunia.

Dari gambar 1.6 dari level paling dasar yaitu level *universal* dimana keseluruhan program di wariskan langsung setelah kelahiran individu tersebut. Pada level tertinggi yaitu *individual* dimana warisan terendah dari program mental dari orangtua kepada anaknya sehingga membuatnya berbeda dari orangtuanya. Dan pada level menengah yaitu *collective* dimana banyak dari program yang ada pada mental manusia merupakan hasil dari warisan induknya dimana akan di bagikan kepada orang-orang lain dengan proses pembelajaran yang sama. Sehingga pada penelitian yang dilakukan oleh Blesia (2017), Hofstede mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jarak kekuasaan dan kolektivis yang besar, penilaian ini didasarkan pada peringkat nilai-nilai budaya jarak kekuasaan dan individualisme di mana jarak kekuasaan Indonesia berada di 43-44 dan individualisme di 6-7 dari 50 negara.

Sesuai dengan strategi perencanaan nasional untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang ditunjukkan untuk menjadi penyumbang dalam proses pembangunan nasional (Bappenas, 2019) dan sebagai salah kelompok sasaran SNLKI (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia) tahun 2017 yaitu UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Masyarakat Indonesia terus memperluas cangkupan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perubahan tingkat kebutuhan di dalam hidup. Sehingga sebagai salah satu wadah usaha yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat di Indonesia dan sebagai salah satu unit penting yang mempertahankan laju perkenomian. UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan perkenomian di Indonesia. UMKM juga berperan untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia serta pendistribusian hasil-

hasil pembangunan. Pada proses pengembangannya UMKM dapat difasilitasi oleh pasar keuangan, dan dapat menyebabkan pengurangan kemiskinan yang substansial yang akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional (Kemendag, 2013). UMKM tidak terpengaruh secara langsung terhadap krisis yang terjadi di perekonomian yang ditandai dengan krisis ekonomi di tahun 1997-1998 dimana UMKM tetap berdiri kokoh. Pasca krisis ekonomi di tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang dan terus mengalami peningkatan (LPPI & Bank Indonesia, 2015).

Tabel 1.5 Perbedaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 (Dalam Rupiah)

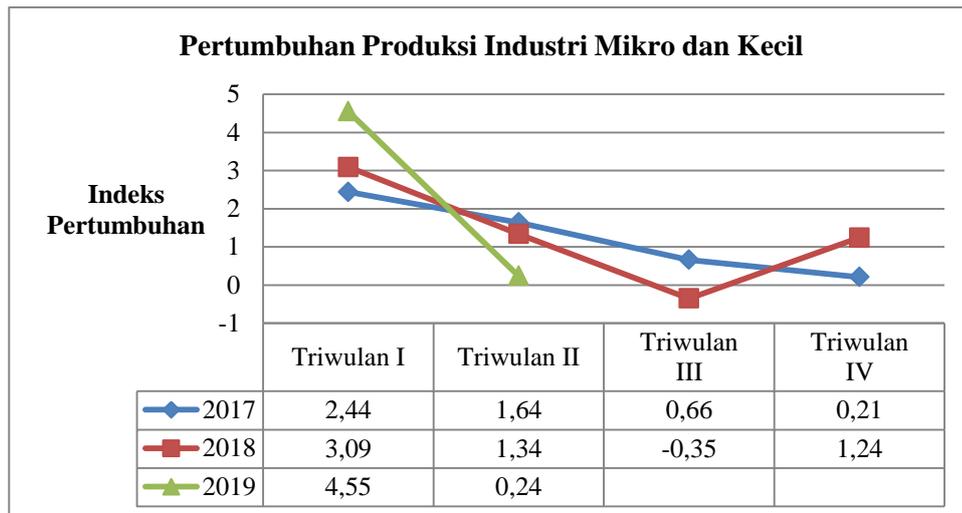
No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2	Usaha Kecil	50 juta – >500 juta	300 juta – >2,5 miliar
3	Usaha Menengah	500 juta – >10 miliar	2,5 miliar – >50 miliar

Sumber : OJK, 2017

Menurut pembagian jenis bisnis dari UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) dijelaskan melalui tabel 1.5. Didasari dengan dua kriteria utama yaitu nilai asset dan omzet yang dimiliki oleh perusahaan didapatkan penggolongan unit usaha menengah, kecil dan mikro. Usaha mikro memiliki nilai asset maksimal Rp.50 juta dan omzet maksimal Rp.300 juta. Usaha kecil dengan nilai asset Rp.50juta sampai lebih kecil dari Rp.500 juta dan omzet Rp.300 juta sampai lebih kecil dari Rp.2,5 miliar diikuti dengan usaha menengah dengan nilai asset Rp.500

juta sampai lebih kecil dari Rp.10 miliar dan omzet Rp.2,5 miliar sampai lebih kecil dari Rp.50 miliar.

Berikut merupakan laju pertumbuhan produksi dari industri mikro dan kecil pada tahun 2017 sampai tahun 2019 di Indonesia.



Sumber : BPS, 2019 (Data diolah)

**Gambar 1.8 Pertumbuhan Produksi Triwulan Industri Mikro dan Kecil
2017-2019**

Berdasarkan gambar 1.5, terlihat bagaimana pergerakan pertumbuhan produksi dari industri mikro dan kecil di Indonesia. Terlihat bagaimana setiap triwulan pertama pada setiap tahunnya dari 2017-2019, pertumbuhan produksi mencapai titik tertinggi. Seiring dengan berjalannya waktu menuju ke triwulan II, III dan IV angka pertumbuhan produksi mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebagai tahun dasar penelitian ini, terlihat bagaimana grafik dari pertumbuhan dari triwulan I menuju ke triwulan II mengalami penurunan yang cukup signifikan di awal triwulan pertama yang lebih tinggi dari 2017 dan 2018 tetapi langsung mengalami penurunan yang lebih rendah dari tahun 2017 dan 2018. Menurunnya

pertumbuhan produksi di triwulan II dari industri mikro dan kecil di Indonesia sama seperti yang terjadi pada penurunan PDB di Indonesia.

Dengan adanya kebutuhan untuk kebutuhan produksi usaha mikro dan kecil maka dibutuhkan modal kerja atau untuk kebutuhan ekspansi melalui lembaga-lembaga keuangan. Kebutuhan akan modal dalam bentuk pinjaman terhadap lembaga keuangan menjadi pilihan utama dari para pelaku usaha menengah kecil dan mikro yang sulit untuk mendapatkan tambahan modal di luar dari pinjaman dengan lembaga keuangan. Berikut merupakan jumlah kredit usaha menengah kecil dan mikro per daerah di pulau Jawa per tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

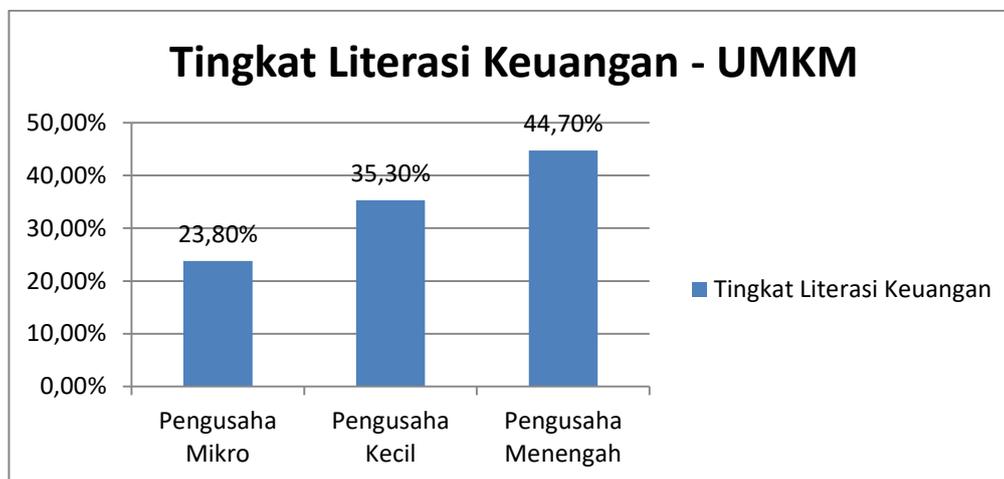
**Tabel 1.6 Kredit UMKM dan UKM Menurut Lokasi Proyek Per Daerah
Tingkat I (Dalam Milyar Rupiah)**

Daerah UMKM	2015	2016	2017	2018	2019*
Jawa Barat	90.224	101.893	114.725	127.067	133.334
Banten	29.224	32.359	37.000	42.503	43.833
DKI Jakarta	118.432	117.595	132.530	141.315	146.465
DI Yogyakarta	10.954	12.108	13.143	14.505	15.144
Jawa Tengah	78.824	88.372	96.772	108.057	115.053
Jawa Timur	97.159	110.143	122.548	137.124	144.554
*Tahun 2019 di ambil per semester pertama					

Sumber : OJK, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.5, perkembangan jumlah kredit yang diambil oleh UMKM dan UKM di Indonesia selama lima tahun terakhir. Khusus untuk di

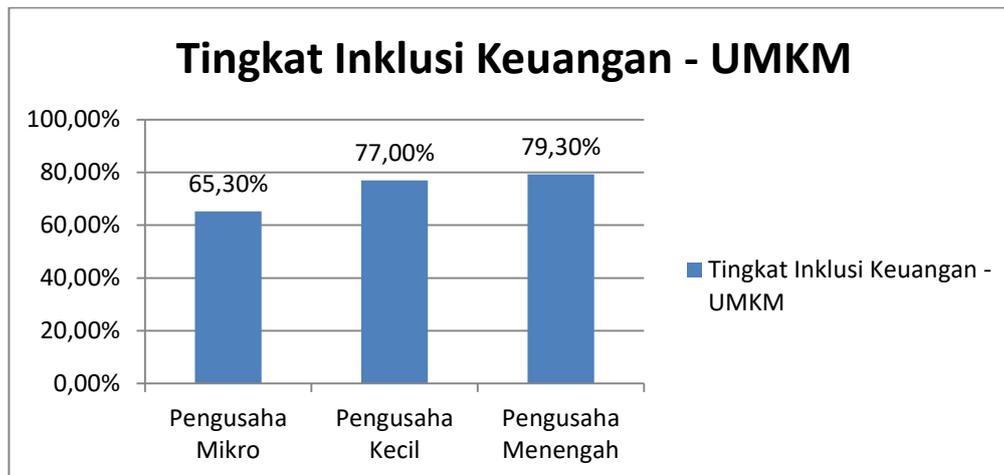
pulau Jawa, DI Yogyakarta menduduki posisi terakhir untuk jumlah kredit yang diambil oleh UMKM dan UKM dengan total Rp. 15.144 milyar per semester pertama 2019 dan disusul oleh provinsi Banten dengan total Rp. 43.833 milyar per semester pertama 2019. Dengan provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp. 100.000 milyar per semester pertama 2019. Dari data ini terlihat bagaimana perkembangan jumlah kredit di UMKM dan UKM di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun.



Sumber : OJK,2017

Gambar 1.9 Tingkat Literasi Keuangan – Pengusaha UMKM

Data dari gambar 1.9 menunjukkan bahwa tingkat literasi untuk UMKM masih rendah dan tingkat terendah berada pada pengusaha mikro yaitu sebesar 23,8%. Didukung dari OECD (2015) yang menyatakan salah satu hambatan UMKM tidak menggunakan instrument pembiayaan adalah mereka tidak menyadari atau kurang mendapatkan informasi untuk produk atau jasa pembiayaan diri mereka yang disediakan oleh lembaga keuangan.



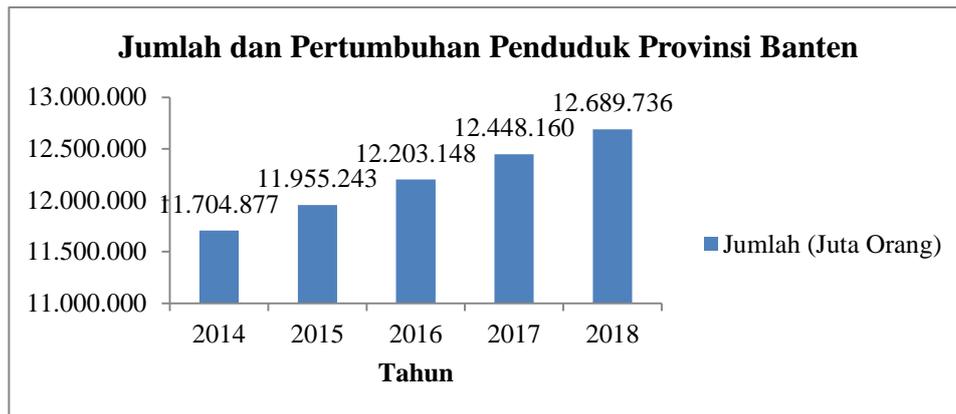
Sumber : OJK, 2017

Gambar 1.10 Tingkat Inklusi Keuangan – Pengusaha UMKM

Berdasarkan gambar 1.10 menunjukkan data inklusi keuangan di dalam pengusaha UMKM dan tingkat terendah berada pada pengusaha mikro dengan 65,3%. Di dalam survei *Baseline* Portfolio Investasi UMKM Rumah Tangga yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2014 juga disebutkan ketika UMKM mengalami kesulitan keuangan di dalam usaha, sebanyak 26,4% UMKM cenderung memilih untuk meminjam kepada keluarga, teman, atasan, tetangga, atau arisan. Sebanyak 14,7% memilih untuk memotong beban usaha mereka. Hanya sebesar 7% yang memilih untuk melakukan pinjaman ke bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden cenderung memilih pembiayaan informal sebagai solusi dari kesulitan keuangan mereka.

Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang menopang ibu kota DKI Jakarta dengan adanya bandara internasional Soekarno Hatta yang berada di provinsi Banten, jalur perdagangan laut dan penyambung pulau Jawa dengan pulau Sumatera dengan adanya pelabuhan merak, sebagai daerah dengan kawasan

industri sehingga provinsi Banten di pulau Jawa memiliki persentase penduduk miskin paling rendah kedua setelah DKI Jakarta dan untuk tingkat pembangunan manusia di Banten di tahun 2018 yang mencapai peringkat ketiga terbaik setelah DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta.



Sumber : BPS Banten, 2019

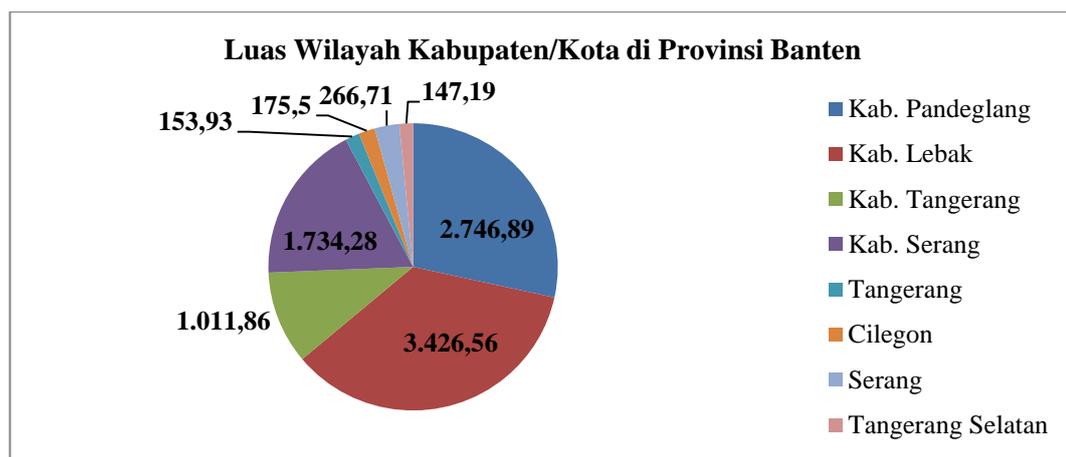
**Gambar 1.11 Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten
dari Tahun 2014 Sampai 2018**

Dari gambar 1.11 pertumbuhan masyarakat di provinsi Banten meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Pertumbuhan yang terjadi terlihat terus menaik dari angka 11.708.877 sampai dengan angka 12.689.736 juta orang penduduk. Dimana jika dibandingkan dengan kredit umkm nya kecil kedua terakhir setelah provinsi DI Yogyakarta masih terdapat peluang untuk perkembangan UMKM di provinsi Banten. Berdasarkan perbandingan pencapaian provinsi Banten dengan provinsi se-Jawa yang dilakukan terhadap empat indikator ekonomi dan sosial utama, provinsi Banten menduduki posisi ketiga untuk PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) di pulau Jawa. Dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur untuk di posisi pertama dan kedua dengan angka Rp.

248,3 juta dan Rp. 55,4 juta. Sehingga membuat provinsi Banten dengan angka Rp. 48,5 juta sebagai provinsi paling dekat dengan DKI Jakarta dengan tingkat PDRB tertinggi.

Dilihat dari sisi usaha/perusahaan sebagai subyek penyumbang PDRB untuk provinsi Banten, berdasarkan survei dari BPS provinsi Banten pada tahun 2017 secara tahunan provinsi Banten memiliki 105.710 usaha/perusahaan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase 91,00% merupakan industri mikro dan sisanya merupakan industri kecil. Dengan pengelompokan survei berdasarkan kode KBLI, untuk kode KBLI nomor 10 yaitu industri makanan sebanyak 39.438 usaha mikro dan kecil tersebar di seluruh provinsi Banten dan menempati urutan pertama sebagai kode KBLI dengan usaha mikro dan kecil terbanyak (BPS Banten, 2019).

Provinsi Banten memiliki empat Kabupaten dan empat Kota, dengan pembagian wilayah dari Kabupaten dan Kota sebagai berikut :



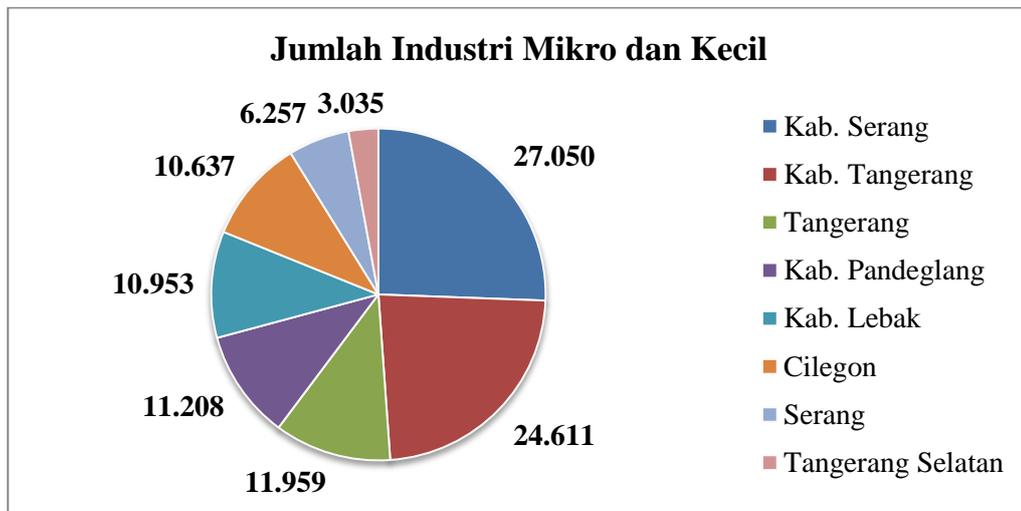
Sumber : BPS Banten, 2019 (Data Diolah)

Gambar 1.12 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

(km²) per Tahun 2018

Dari gambar 1.9 terlihat luas wilayah dari setiap Kabupaten/Kota yang dibagi atas empat Kabupaten dan empat Kota di provinsi Banten. Kabupaten Lebak dan Pandeglang menempati urutan pertama dan kedua dengan luas wilayah terbesar yaitu 3.426,56km² dan 2.746,89km². Kota Tangerang Selatan menempati luas wilayah terkecil di Provinsi Banten yaitu dengan luas wilayah 147,19km².

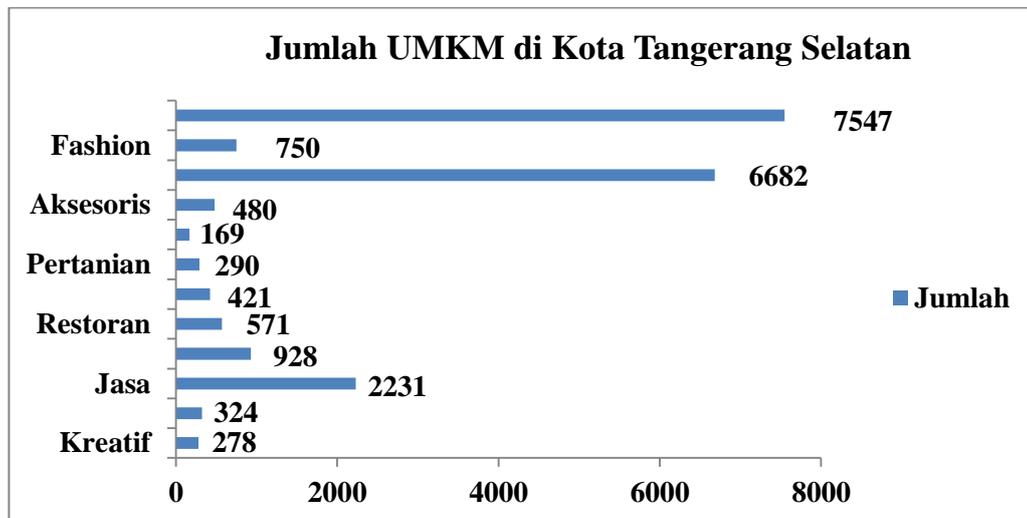
Tangerang Selatan merupakan Kabupaten/Kota di provinsi Banten dengan luas wilayah geografis terkecil dengan total 147,19km² dan total penduduk 1.696.308 orang per tahun 2018 dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan sebesar 3,40% per tahun selama tahun 2010-2018 dimana menunjukkan angka pertumbuhan penduduk terbesar di provinsi Banten. Diikuti dengan rata-rata upah buruh atau karyawan tertinggi di angka 5,47 juta per bulan dengan angka terendah adalah 2,29 juta per bulan di Kabupaten Lebak. Tingkat kemiskinan terendah juga berada di Kota Tangerang Selatan dengan angka 1,68% dari total penduduk di Kota Tangerang Selatan tentu saja tingkat IPM di Kota Tangerang Selatan menjadi tertinggi di angka 81,17 di atas rata-rata IPM Provinsi Banten yaitu 71,95 (BPS Banten, 2019). Terlihat bagaimana Tangerang Selatan memiliki potensi kuat untuk menjadi Kota yang memberikan kontribusi kepada pertumbuhan Provinsi Banten untuk menjadi Provinsi yang lebih baik lagi.



Sumber : BPS Banten, 2019 (Data Diolah)

Gambar 1.13 Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Mikro Dan Kecil Per Tahun 2017 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Tabel di atas menggambarkan besaran jumlah industri mikro dan kecil berdasarkan pembagian wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Serang memiliki jumlah usaha mikro kecil paling banyak dari total jumlah usaha mikro kecil di Banten dengan 27.050 perusahaan dan diikuti oleh Kabupaten Tangerang sebanyak 24.611 perusahaan dan wilayah dengan jumlah terkecil merupakan Tangerang Selatan dengan jumlah 3.035 perusahaan. Usaha mikro dan kecil di provinsi Banten menyerap tenaga kerja dengan jumlah 268.195 orang pekerja dan 31,60% diserap oleh usaha dengan KBLI 10 atau industri makanan.



Sumber : Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2019

Gambar 1.14 Jumlah UMKM Menurut Jenisnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Dari gambar 1.11 terlihat bagaimana jumlah UMKM yang berada di Kota Tangerang Selatan per tahun 2017 berdasarkan jenis usaha yang dijalankan. Terlihat bagaimana jenis usaha kuliner menempati posisi pertama dengan jumlah terbanyak di Kota Tangerang Selatan yaitu sebanyak 7.547 unit usaha. Diikuti dengan usaha sembako/toko dengan jumlah 6.682 unit usaha. Untuk unit usaha dengan jumlah terkecil merupakan jenis usaha perikanan dengan jumlah 169 unit usaha. Hal ini dikarenakan keadaan geografis Kota Tangerang Selatan yang tidak memiliki akses langsung ke laut. Sehingga lebih di dominasi oleh usaha kuliner di Kota Tangerang Selatan. Menurut definisi dari konteks ekonomi kreatif Indonesia, kuliner dalam Bahasa Indonesia merupakan bagian dari industri penyedia makanan yang kegiatannya meliputi semua hal yang terkait dengan aktivitas memasak yang di mana estetika dan kreativitas merupakan elemen yang sangat penting. Segmen industri ini meliputi restoran lokal, restoran *full-service*, toko makanan, dan jasa boga. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa usaha kuliner

merupakan keseluruhan bagian dari industri penyedia makanan yang mencakup semua hal yang terkait dengan aktivitas memasak. Berikut merupakan ruang lingkup industri kuliner berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) :

Tabel 1.7 Ruang Lingkup Industri Kuliner Berdasarkan Kode KBLI

No	Kode	Deskripsi
1	56101	Restoran
2	56102	Warung Makan
3	56103	Kedai Makanan
4	56104	Penyediaan Makanan Keliling Atau Tempat Tidak Tetap
5	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (<i>Event Catering</i>)
6	56290	Penyediaan Makanan Lainnya
7	56301	Bar
8	56302	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman
9	56303	Rumah Minum Atau Kafe
10	56304	Rumah Atau Kedai Obat Tradisional
11	56305	Penyediaan Minuman Keliling Atau Tempat Tidak Tetap

Sumber : BPS, 2017

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari pemerintah daerah Tangerang Selatan mengenai UMKM, peneliti mendapatkan data untuk jumlah UMKM sebagai hasil sensus yang dilakukan per tahun 2018 seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 1.8 Hasil Tabulasi Pendataan Sensus UMKM Tangerang Selatan oleh
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan per Tahun 2018**

JENIS UMKM	KECAMATAN							JUMLAH
	CIPUTAT TIMUR	CIPUTAT	PAMULANG	PONDOK AREN	SETU	SERPONG	SRPONG UTARA	
Aksesoris	85	49	47	63	20	167	48	479
Fashion	79	70	66	152	36	291	45	739
Furniture	29	41	24	120	15	59	34	322
Jasa	324	210	195	367	164	534	431	2.225
Konter/Hp	197	80	140	131	62	174	139	923
Konveksi	34	28	47	214	18	43	33	417
Kreatif	29	18	58	47	13	59	52	276
Kuliner	1.213	871	818	988	455	2.002	1.150	7.497
Perikanan	10	14	20	49	9	37	27	166
Pertanian	8	14	77	89	18	52	29	287
Restoran	102	61	25	117	31	135	100	571
Sembako	119	288	67	360	136	657	330	1.957
Toko	596	538	642	826	275	966	852	4.695
Lain-Lain	11	2	12	40	1	46	5	117
JUMLAH UKM	2.836	2.284	2.238	3.563	1.253	5.222	3.275	20.671

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, 2019

Berdasarkan tabel 1.5 terlihat penjabaran unit usaha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan jenis usaha yang dijalankan. Dengan jumlah per Kecamatan yaitu Ciputat Timur 2.836 unit, Ciputat 2.284 unit, Pamulang 2.238 unit, Pondok Aren 3.563 unit, Setu 1.253 unit, Serpong 5.222 unit, dan Serpong Utara 3.275 unit. Jumlah UMKM terbanyak berada pada sektor kuliner dengan total 7.497 unit usaha, diikuti dengan toko yaitu dengan total 4.695 unit usaha yang tercatat. Dapat disimpulkan bahwa UMKM di sektor kuliner Kota Tangerang Selatan dengan jumlah terbanyak telah memberikan kontribusi yang cukup terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan dan menjadi sektor penting yang harus dipertahankan serta dikembangkan dengan baik oleh pemerintah setempat.

Melihat besarnya potensi perkembangan UMKM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian, diharapkan penelitian ini dapat menggali lebih dalam mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan beserta faktor penggerakannya, yaitu *knowledge*, *skills*, *attitude* dan *behavior*. Kemudian akan diuji dengan *social capital* sebagai mediasi untuk mengukur pengaruh positifnya terhadap inklusi keuangan para pelaku usaha UMKM dengan kode KBLI di bidang usaha kuliner di wilayah Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di dalam latar belakang terlihat bahwa tingkat *financial literacy* dapat mempengaruhi tingkat *financial inclusion* di suatu daerah. Dimana tingkat fluktuasi dari *financial literacy* di setiap daerah sangat beragam dan terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Terutama dengan

banyaknya *financial services* yang diberikan oleh pihak institusi keuangan tentu saja juga akan mempengaruhi peningkatan *financial inclusion* di suatu daerah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas, peneliti akan menguraikan pertanyaan penelitian. Rumusan hipotesis akan disusun berdasarkan pertanyaan penelitian di bawah ini. Berikut ini adalah pertanyaan penelitian peneliti :

1. Apakah *financial literacy* berpengaruh terhadap *financial inclusion* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan ?
2. Apakah *financial literacy* berpengaruh terhadap *social capital* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan ?
3. Apakah *social capital* berpengaruh terhadap *financial inclusion* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.
4. Apakah *social capital* sebagai mediator variabel dari hubungan *financial literacy* terhadap *financial inclusion* dari UMKM di Kota Tangerang Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *financial literacy* mempengaruhi *financial inclusion* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah *financial literacy* mempengaruhi *social capital* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.

3. Untuk mengetahui apakah *social capital* mempengaruhi *financial inclusion* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.
4. Untuk mengetahui apakah *social capital* sebagai mediator variabel dari hubungan *financial literacy* terhadap *financial inclusion* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian:

1.4.1 Manfaat Edukasi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dari inklusi keuangan di daerah Tangerang Selatan yang di pengaruhi oleh literasi keuangan dengan adanya kekuatan dari *social capital* di masyarakat, dan diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

1.4.2. Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah terutama yang berada di provinsi Banten khususnya kota Tangerang Selatan untuk semakin paham, terampil dan percaya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam menggunakan produk dan layanan keuangan yang sudah difasilitasi oleh lembaga keuangan dan pemerintah. Dimana dengan demikian para pelaku usaha kecil dan menengah dapat semakin mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan.

1.4.3 Manfaat Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga keuangan untuk semakin mengerti kebutuhan masyarakat untuk produk-produk keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga keuangan diharapkan dapat terus melakukan inovasi dan menciptakan produk layanan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan dari segmentasi masyarakat yang dituju.

1.4.4 Manfaat Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan di negara Indonesia. Sehingga dapat mendorong tingkat pertumbuhan negara Indonesia sesuai atau melebihi dari target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

1.5 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup dari penelitian ini agar pembahasan dapat lebih terfokus dan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Batasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. *Sampling unit* dari penelitian ini adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang berada di Provinsi Banten khususnya Kota Tangerang Selatan, termasuk di dalam kode KBLI untuk unit usaha 56102 (Warung Makan), usaha yang didirikan sudah berdiri minimal 6 bulan (terhitung sampai Oktober 2019) dan pernah berhubungan dengan lembaga keuangan.

2. Dalam penelitian ini akan diangkat 3 variabel utama yaitu variabel *financial literacy*, *financial inclusion* dan *social capital* sebagai variabel mediasi serta terdapat 4 dimensi di dalam variabel *financial literacy* yaitu *knowledge*, *skill*, *behavior*, dan *attitude*.
3. Ruang lingkup wilayah penelitian mencakup Kota Tangerang Selatan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap kelurahan di Kota Tangerang Selatan yang masing-masing diambil berdasarkan metode pengambilan *sampling* yang menargetkan usaha mikro dan kecil bergerak di bidang kuliner pada 8 kecamatan di Kota Tangerang Selatan.
4. Penyebaran kuesioner dilakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai 29 November 2019.
5. Penelitian ini menggunakan untuk SPSS versi 25 untuk *pre-test* dan AMOS versi 24 *main test*.

1.6 Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini peneliti membahas latar belakang dilakukannya penelitian, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab ini peneliti membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang meliputi:

Teori *financial behavior* dan teori mengenai variabel yang digunakan. Selain membahas pengertian, bab ini juga menyertakan penelitian terdahulu yang

telah dilakukan sebelumnya beserta hasil yang didapat, model penelitian, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini peneliti membahas gambaran umum objek penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti membahas mengenai pengolahan dan hasil analisis data yang diusulkan oleh peneliti, dan menjelaskan bahasan yang tertera pada tujuan penelitian.

Bab V: Penutup

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa maupun pihak yang terkait dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

Bagian ini berisi judul buku maupun artikel yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.

Lampiran

Bagian ini berisi bukti data yang digunakan dan hasil data yang diolah dalam membahas Bab IV.